

TESIS

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP DOKTER DALAM
PELAYANAN TELEFARMASI SEBAGAI BAGIAN DARI
EKOSISTEM TELEMEDISIN DI INDONESIA**

***LEGAL PROTECTION FOR DOCTORS IN TELEPHARMACY SERVICES
AS PART OF THE TELEMEDICINE ECOSYSTEM IN INDONESIA***



Oleh:

ADI SUKRISNO

NIM. 2410622045

**PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM MAGISTER
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL “VETERAN” JAKARTA
JAKARTA
2026**

TESIS

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP DOKTER DALAM
PELAYANAN TELEFARMASI SEBAGAI BAGIAN DARI
EKOSISTEM TELEMEDISIN DI INDONESIA**

**LEGAL PROTECTION FOR DOCTORS IN TELEPHARMACY
SERVICES AS PART OF THE TELEMEDICINE ECOSYSTEM
IN INDONESIA**



Oleh:

ADI SUKRISNO

NIM. 2410622045

**PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM MAGISTER
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL “VETERAN” JAKARTA
JAKARTA
2026**

HALAMAN JUDUL

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP DOKTER DALAM
PELAYANAN TELEFARMASI SEBAGAI BAGIAN DARI
EKOSISTEM TELEMEDISIN DI INDONESIA**

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar Magister
Pada Program Studi Hukum Program Magister

Disusun dan diajukan oleh:

ADI SUKRISNO

NIM. 2410622045

**PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM MAGISTER
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL “VETERAN” JAKARTA
JAKARTA
2026**

PERSETUJUAN PEMBIMBING

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP DOKTER DALAM PELAYANAN TELEFARMASI SEBAGAI BAGIAN DARI EKOSISTEM TELEMEDISIN DI INDONESIA

Disusun dan diajukan oleh:

ADI SUKRISNO

NIM. 2410622045

Disetujui untuk Tahap UJIAN TESIS

Pada Tanggal.....

Menyetujui:

Pembimbing 1

Pembimbing 2



Dr. dr. Abdul Kolib, M.H.
NIDN. 0019087805



Dr. Handar Subhandi Bakhtiar, S.H.,
M.H., M.Tr.Adm.Kes. DipFS
NIP. 199304282022031009



KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI,
SAINS, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN" JAKARTA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Rumah Sakit Fatmawati, Pondok Labu, Jakarta Selatan 12450
Telepon 021-7656971, Fax 021-7656904
Laman : hukum.upnvj.ac.id, e-mail: fh@upnvj.ac.id

LEMBAR PENGESAHAN TESIS

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP DOKTER DALAM
PELAYANAN TELEFARMASI SEBAGAI BAGIAN DARI
EKOSISTEM TELEMEDISIN DI INDONESIA

Disusun dan diajukan oleh:

ADI SUKRISNO

NIM. 2410622045

Telah diujikan dihadapan Panitia Ujian yang dibentuk dalam rangka
Penyelesaian Studi Program Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas

Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta

Pada Tanggal 9 Juli 2026

Dan dinyatakan telah memenuhi syarat Kelulusan

Menyetujui:

Pembimbing 1

Dr. dr. Abdul Kolib, M.H.
NIDN. 0019087805

Pembimbing 2

Dr. Handar Subhandi Bakhtiar, S.H., M.H.,
M.Tr.Adm.Kes., DipFS.
NIP. 199304282022031009

Dekan Fakultas Hukum

Dr. Suherman, S.H., LL.M.
NIP. 197006022021211004

Koordinator Program Studi
Magister Hukum

Dr. Muhammad Helmi Fahrozi, S.H.I., S.H.,
M.H.
NIP. 198910192025211048

PERNYATAAN KEASLIAN

Nama : Adi Sukrisno
NIM : 2410622045
Program Studi : Magister Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa penulisan Tesis yang Berjudul **“PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP DOKTER DALAM PELAYANAN TELEFARMASI SEBAGAI BAGIAN DARI EKOSISTEM TELEMEDISIN DI INDONESIA”** adalah benar-benar karya saya sendiri. Adapun yang bukan merupakan karya saya dalam penulisan Tesis ini diberi tanda citasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Nomor 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi dan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Jakarta, 20 Agustus 2026

Yang Membuat Pernyataan,



Adi Sukrisno
NIM. 2410622045

PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI

Sebagai civitas akademik Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Adi Sukrisno
NIM : 2410622045
Program Studi : Magister Hukum

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta Hak Bebas Royalti Non eksklusif (*Non-exclusive Royalti Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul: **“PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP DOKTER DALAM PELAYANAN TELEFARMASI SEBAGAI BAGIAN DARI EKOSISTEM TELEMEDISIN DI INDONESIA”** beserta perangkat yang ada. Dengan Hak Bebas Royalti ini Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta berhak menyimpan, mengalih media/ formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*data base*), merawat dan mempublikasikan Tesis saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Jakarta, 20 Agustus 2026

Yang Membuat Pernyataan,



Adi Sukrisno
NIM. 2410622045

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah Rabbil'aalamiin, puji sukur saya panjatkan kepada Allah SWT, karena atas berkat dan rahmat-Nya, saya dapat menyelesaikan tesis ini dengan baik. Penulisan tesis ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Hukum pada Program Studi Hukum Program Magister, Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta. Saya menyadari bahwa tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, sangatla sulit bagi saya untuk menyelesaikan karya akhir ini. Oleh karena itu, saya mengucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Anter Venus, MA.Comm. selaku Rektor Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta beserta para Wakil Rektor.
2. Bapak Dr. Suherman S.H., LL.M. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta beserta para Wakil Dekan.
3. Bapak Dr. Muhammad Helmi Fahrozi, S.H.I., S.H., M.H. selaku Koordinator Program Studi Hukum Program Magister Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta yang telah banyak mengarahkan penulis dalam hal kajian Ilmu Hukum maupun dalam mengarahkan penulis dalam proses administrasi pengajuan usulan Penelitian.
4. Bapak Dr. dr. Abdul Kolib, M.H. selaku Pembimbing Utama yang telah memberikan bimbingan, tambahan ilmu, serta masukan dan pengarahan dalam penulisan Tesis ini.
5. Bapak Dr. Handar Subhandi Bakhtiar, S.H., M.H., M.Tr.Adm.Kes., DipFs. selaku Pembimbing Pendamping yang telah meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan, masukan, juga tambahan referensi serta ilmunya dan dengan penuh sabar dan penuh perhatian dalam penulisan Tesis ini.
6. Ayah bunda, ibu mertua, istriku irene tri handayani, anak2 ku tercinta (Dimas dan Devita), atas dukungan fisik dan spiritualnya selama menjalani

pendidikan.

7. Sahabatku dr Fachri Razi, SpOG, Sub sp obginsos, atas dukungan, bantuan dan kerjasamanya selama menjalani pendidikan. Masih panjang perjalanan kita.....

Akhir kata penulis mohon maaf yang sebesar-besarnya atas segala kesalahan yang penulis buat baik sengaja maupun tidak disengaja selama berkuliah di Program Studi Hukum Program Magister Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta. maupun selama penulisan Tesis ini. Semoga Allah SWT mengampuni segala kesalahan dan menunjukkan jalan yang lurus dan benar kepada kita semua. Amin

Jakarta, 20 Agustus 2026

Penulis



Adi Sukrisno

ABSTRAK

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP DOKTER DALAM PELAYANAN TELEFARMASI SEBAGAI BAGIAN DARI EKOSISTEM TELEMEDISIN DI INDONESIA

Adi Sukrisno (2410622045), Abdul Kolib, Handar Subhandi Bakhtiar

Penelitian ini membahas perlindungan hukum terhadap dokter dalam pelayanan telefarmasi sebagai bagian dari ekosistem telemedisin di Indonesia. Transformasi digital kesehatan memperluas akses pasien terhadap konsultasi medis, verifikasi resep elektronik, pelayanan informasi obat, pemantauan terapi, dan distribusi obat jarak jauh. Namun, perkembangan tersebut belum diikuti pengaturan hukum yang khusus dan komprehensif. Dokter sebagai Dokter Penanggung Jawab Pasien memiliki peran utama dalam anamnesis, penegakan diagnosis, penentuan terapi, dan penerbitan resep elektronik. Setelah resep dikirim melalui sistem digital, pelayanan melibatkan apoteker, fasilitas pelayanan kesehatan, apotek, penyelenggara sistem elektronik, platform digital, dan penyedia logistik. Keterlibatan banyak aktor menimbulkan persoalan mengenai batas kewenangan, standar kehati-hatian, validitas informed consent elektronik, keabsahan rekam medis elektronik, keamanan data pasien, serta distribusi pertanggungjawaban apabila terjadi medication error, kegagalan sistem, kebocoran data, atau kesalahan pengiriman obat. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan teori hukum. Bahan hukum primer meliputi UUD NRI Tahun 1945, UU Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, UU Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, KUHP Tahun 2023, PP Nomor 28 Tahun 2024, dan regulasi teknis terkait. Bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal, laporan organisasi internasional, dan doktrin hukum kesehatan digital. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hukum positif Indonesia telah mengakui telekesehatan dan telemedisin, tetapi belum mengatur secara tegas perlindungan dokter dalam telefarmasi. Regulasi yang ada masih sektoral dan belum menentukan kapan tanggung jawab profesional dokter berakhir serta kapan tanggung jawab beralih kepada apoteker, fasilitas pelayanan kefarmasian, platform, atau penyelenggara sistem elektronik. Kondisi ini membuka risiko kriminalisasi, gugatan perdata, sanksi administratif, dan penegakan disiplin yang tidak proporsional. Penelitian ini menawarkan Tiered and Distributed Causal Liability Model sebagai model pertanggungjawaban kausal berjenjang dan terdistribusi. Model ini membebankan tanggung jawab berdasarkan fungsi, kewenangan, tingkat kontrol, dan kontribusi kausal setiap aktor. Penelitian merekomendasikan pembentukan regulasi khusus telefarmasi, standar operasional digital, audit teknologi, penguatan keamanan data, serta mekanisme pembuktian yang mampu membedakan kesalahan profesional dokter dari kegagalan sistem elektronik secara adil dan terukur. Dengan rumusan tersebut, penelitian ini memperkuat keseimbangan antara keselamatan pasien, akuntabilitas layanan digital, dan kepastian hukum profesi dokter dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan berbasis teknologi informasi di Indonesia secara aman, rasional, proporsional, dan berkelanjutan.

Kata Kunci: telefarmasi, perlindungan hukum, pelayanan kesehatan digital, pertanggungjawaban kausal terdistribusi

ABSTRACT

LEGAL PROTECTION FOR DOCTORS IN TELEPHARMACY SERVICES AS PART OF THE TELEMEDICINE ECOSYSTEM IN INDONESIA

Adi Sukrisno (2410622045), Abdul Kolib, Handar Subhandi Bakhtiar

This study examines the legal protection of doctors in telepharmacy services as part of the telemedicine ecosystem in Indonesia. Digital health transformation expands patient access to medical consultations, electronic prescription verification, drug information services, therapy monitoring, and remote drug distribution. However, this development has not been accompanied by specific and comprehensive legal regulation. Doctors, as physicians in charge of patients, play a central role in anamnesis, diagnosis, therapeutic decision-making, and the issuance of electronic prescriptions. Once a prescription is transmitted through a digital system, the service involves pharmacists, healthcare facilities, pharmacies, electronic system providers, digital platforms, and logistics providers. The involvement of multiple actors creates legal issues concerning the limits of authority, standards of prudence, validity of electronic informed consent, legality of electronic medical records, patient data security, and the distribution of liability in cases of medication error, system failure, data leakage, or errors in drug delivery. This study uses a normative juridical method with statutory, conceptual, and legal theory approaches. Primary legal materials include the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia, Law Number 17 of 2023 concerning Health, Law Number 1 of 2024 concerning Electronic Information and Transactions, the 2023 Criminal Code, Government Regulation Number 28 of 2024, and relevant technical regulations. Secondary legal materials consist of books, journal articles, reports from international organizations, and legal doctrines on digital health law. The findings show that Indonesian positive law has recognized telehealth and telemedicine, but it has not explicitly regulated the legal protection of doctors in telepharmacy. Existing regulations remain sectoral and do not clearly determine when a doctor's professional responsibility ends and when responsibility shifts to pharmacists, pharmaceutical service facilities, platforms, or electronic system providers. This condition creates risks of criminalization, civil lawsuits, administrative sanctions, and disproportionate disciplinary enforcement. This study proposes the Tiered and Distributed Causal Liability Model as a model of tiered and distributed causal liability. This model allocates responsibility based on the function, authority, level of control, and causal contribution of each actor. The study recommends the establishment of specific telepharmacy regulations, digital standard operating procedures, technology audits, stronger data security, and evidentiary mechanisms capable of distinguishing doctors' professional errors from electronic system failures in a fair and measurable manner. Through this formulation, the study strengthens the balance between patient safety, digital service accountability, and legal certainty for the medical profession in the provision of information technology-based healthcare services in Indonesia in a safe, rational, proportional, and sustainable manner.

Keywords: telepharmacy, legal protection, digital healthcare services, distributed causal liability

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL TESIS.....	i
HALAMAN JUDUL	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
LEMBAR PENGESAHAN TESIS	iv
PERNYATAAN KEASLIAN	v
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI.....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
ABSTRAK	ix
BAB I.....	1
PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian	6
E. Orisinalitas Penelitian.....	7
BAB II	10
TINJAUAN PUSTAKA	10
A. Kajian konseptual	10
B. Kajian Teoritis.....	24
C. Kerangka Pikir	38
D. Definisi Operasional.....	39

BAB III.....	41
METODE PENELITIAN	41
A. Tipe Penelitian dan Pendekatan Penelitian	41
B. Jenis dan Sumber Bahan Hukum.....	41
C. Teknik Pengumpulan Data/Bahan hukum	42
D. Analisis Data/Bahan Hukum.....	42
BAB IV	44
HASIL DAN PEMBAHASAN	44
A. Perlindungan hukum terhadap dokter dalam penyelenggaraan pelayanan telefarmasi sebagai bagian dari ekosistem telemedisin berdasarkan peraturan perundang-undangan di Indonesia saat ini?	
Error! Bookmark not defined.	
B. Bagaimanakah pengaturan hukum yang ideal untuk mengatasi hambatan yuridis bagi dokter dalam pelayanan telefarmasi sebagai bagian dari ekosistem telemedisin di Indonesia?	
Error! Bookmark not defined.	
BAB V.....	70
PENUTUP.....	70
A. Kesimpulan.....	70
B. Saran	70
DAFTAR PUSTAKA.....	73